

Kuasa dan Pengetahuan

Ariel Heryanto

KEBANYAKAN penguasa pasca-kolonial di Asia, Afrika, dan Amerika Latin kelabakan bisa menghadapi kecaman dari luar mengenai pelanggaran hak-hak asasi manusia. Biasanya mereka berkelit dengan apologi, mengatakan persoalan hak asasi dalam negeri mereka tak boleh dicampuri pihak luar dan/atau pihak luar tidak memahami apa yang terjadi karena "berbagai nilai budaya" yang unik, dan tak mungkin dapat dipahami pihak luar.

Gejala ini sudah kita kenal baik dan tak pernah mengecoh kita. Kita tahu retorika itu hanyalah siasat murahan untuk mendapatkan monopoli otoritas berbicara tentang pelanggaran hak asasi yang dikerjakan semuanya di negeri sendiri, dan menampik hak pihak lain untuk ikut berbicara. Tak ada pihak mana pun di dalam atau di luar negeri mereka yang menerima penalaran siasat itu dan mendukungnya sebagai kebijakan moral, politik atau intelektual.

Yang menarik, strategi serupa ternyata tidak terjadi hanya pada hubungan internasional. Gejala itu telah menyebar dalam berbagai bidang kehidupan kita sehari-hari dalam bentuk, konteks dan lingkup yang bermacam-macam. Juga dalam lingkungan kaum intelektual, moralis dan pengritik rezim-rezim pasca-kolonial. Tulisan ini akan mempersoalkan gejala yang disebut belakangan ini. Tetapi sebelum itu, gejala internasional tadi perlu ditengok sedikit lebih jauh untuk memperjelas perbandingan.

Beda Timur dan Barat

Sedikitnya ada tiga kelemahan pada cara berkelit para rezim ini. Pertama, mereka tidak

(mampu) menyangkal adanya pelanggaran hak asasi -- terlepas dari persoalan apa makna pelanggaran itu menurut "nilai budaya" bangsa-negara yang bersangkutan. Kedua, mereka tidak konsisten dalam menilai keabsahan campur-tangan dan pengetahuan pihak luar. Para pengemis luar itu tiba-tiba bisa dianggap "penuh pengertian" bila memasukkan modal asing atau memberi dana pinjaman.

Ketiga, secara implisit rezim pasca-kolonial itu mengaku seakan-akan hak asasi dan demokrasi di negeri mereka tidak sebaik yang difantasi di negeri-negeri Barat. Hal ini dijelaskan dengan membuat sebuah khayalan atau ideologi (yang kemudian dihayati sebagai kebenaran oleh para pembuatnya sendiri) tentang perbedaan "nilai budaya". Timur dan Barat, dan yang satu tak akan bisa memahami yang lain. Ironisnya, perbedaan semacam ini adalah ciptaan kolonialisme Barat, dan menjadi tradisi pengetahuan yang kemudian dikenal dengan istilah "orientalisme".

Bukannya tak ada yang bisa dibedakan dalam etos berpolitik di Barat dan Timur. Tetapi tidak seperti yang dikhayalkan di atas, dan bukan suatu misteri yang tak bisa saling dipahami. Perbedaan itu bukan karena yang satu negeri maju yang lain negeri berkembang (-kempis). Bukannya yang satu pendekar demokrasi dan hak asasi, yang lain sarang pelanggaran hak asasi.

Hampir semua pejabat negara Asia tak suka menyebut-nyebut hak asasi manusia. Bukan saja dalam kaitan dengan apa yang terjadi di negara masing-masing. Tetapi juga di negara semasa Asia. Ada semacam eti-

ka "tahu diri" dan "tahu-sama-tahu": jangan mengemis kutu di seberang laut, bila gajah di pelupuk mata tak mau dikecam balas oleh pihak lain.

Negara seperti Amerika Serikat (AS) tidak kalah ganas dalam pelanggaran hak asasi manusia dari semua rezim di negeri pasca-kolonial. Malahan tak sedikit pengamat politik berkebangsaan AS yang menunjukkan, AS merupakan pelanggar terbesar di dunia dalam hal hak asasi manusia. Tapi berbeda dari para rezim pasca-kolonial, AS tanpa tahu malu berani berkotbah tentang demokrasi dan hak asasi, sambil mengemis para pengemis di negara pasca-kolonial yang terus-menerus dikirimi perserintahan untuk memantapkan jalannya pelanggaran hak asasi yang dikehendaki.

Ideologi AS kuat bertumbuh di banyak negara pasca-kolonial. Tak jarang ideologi itu saudara-saudara memeluk (dan dipeluk) baik rezim pasca-kolonial maupun para aktivis dan kelompok oposisi di dalam negeri pasca-kolonial itu sendiri yang menentangnya.

Di Indonesia, banyak pejabat pemerintahan berusaha meyakinkan khayak bahwa demokrasi di Indonesia jangan disamakan atau dibandingkan dengan demokrasi di negeri Barat, seperti di AS. Terlepas dari niat dan validitas permintaan itu, yang jelas ada asumsi bahwa AS adalah sebuah model ideal negeri demokratis.

Ucapannya lahir itu dapat dihubungkan dengan berbagai ucapan intelektual yang sering dianggap kritis. Mereka menge-

cam tata politik dengan menggunakan contoh dan acuan ke negeri Barat, khususnya AS. Mungkin karena kehidupan intelektual Indonesia juga terlalu dikuasai ilmu-ilmu sosial dan kebudayaan populer. Mereka menggunakan asumsi yang sama dengan pejabat yang mewakili kepentingan politik yang dikritik si intelektual.

Praktisi dan pengamat

Bukan hanya pengamat pelanggaran hak asasi yang sering berdebat dengan praktisi pelanggaran hak asasi. Bukan hanya praktisi pelanggaran hak asasi yang menuntut monopolisasi otoritas pada jenjang tertinggi dalam berbicara.

Dalam artikel di sebuah koran Jakarta belum lama ini, seorang pelukis bernama Hardi menyatakan bahwa pengamat seni tak akan mampu membahas gejala sosial dalam kesenian secara tepat, atau setepat yang dapat dikerjakan seniman berbagai "praktisi". Hardi menanggapi sebuah polemik tentang hubungan kapitalisme dan seni yang pernah berlangsung di harian *Bernas* (1991), dan baru-baru ini dipublikasikan kembali oleh majalah *Dialog* (1992).

Kesenian memang merupakan sebuah wilayah yang -- sejak zaman Romantisisme di Eropa dan kemudian juga menyebar di wilayah jajahan -- dinyatakan sebagai suatu wilayah penuh misteri. Dalam gempuran kapitalisme, ilmu, dan teknologi selama dua abad belakangan, kesenian babak-belur bertahan diri.

Soal yang sepele ini sebenarnya punya sejarah yang maha panjang dan akar yang maha rumpit. Apa yang dapat dicatat di

sini hanyalah sejumlah percikan di bagian permukaannya saja.

Pada intinya dapat dikatakan, setiap pengetahuan bersifat "terbuka", walaupun bukan tanpa batas. Tidak ada sebuah tempat atau kedudukan istimewa yang memungkinkan orang mencapai pengetahuan secara paling tepat, benar atau lengkap. Pengetahuan bukan suatu rekanan mekanis atas suatu realitas di luar kegiatan mereka itu, yang kemudian dapat diperbincangkan terpisah dari realitas tersebut. Kegiatan itu tak bebas dari jaringan kuasa sosial.

Pengetahuan senantiasa diciptakan manusia dengan berbagai bentuk dan cara yang dimungkinkan oleh kondisi zatannya. Jadi bukan secara tak beraturan. Pengetahuan tak bersifat subjektif seperti yang sering dijadikan dasar klaim para praktisi. Tidak juga obyektif seperti yang pernah dijadikan dasar otoritas ilmu atau dikhawatirkkan demikian oleh kalangan non-ilmuwan.

Untuk jelasnya, kita harus pertimbangkan pandangan di atas pada dataran yang lebih konkret. Kita mulai dari contoh sederhana yang sudah menjadi klasik, yakni seniman dan nilai karya seninya.

Kategori fiktif

Setiap seniman pasti tahu sejumlah hal tentang karyanya yang tak dapat diketahui orang lain, termasuk ahli seni. Tapi si ahli tidak harus tahu segala yang diketahui si seniman untuk bisa menghasilkan pembahasan bermutu.

Tidak berarti si ahli tak bisa lebih tahu dalam beberapa hal lain. Seperti seorang ahli bisa tahu seluk-beluk sejarah dan gramatika bahasa Inggris, tanpa maupun berbahasa itu secara lancar atau sefasih penuturnya. Dan si penutur bisa berbahasa lancar tanpa harus tahu ilmu bahasa.

Seorang tokoh aktivis gerakan mahasiswa -- persis seperti seniman atau politikus pasca-

kolonial -- pasti tahu banyak hal yang tak diketahui khayak dan ilmuwan. Tapi minimal karena alasan-alasan strategis dan kepentingan yang diperjuangkan. "praktisi" ini tidak bisa menyatakan yang diketahuinya secara terbuka. Ia tak pernah bisa netral betapapun jujurnya dia.

Kaum "pengamat" sendiri tidak pernah bisa sepenuhnya netral dan terbuka karena berbagai alasan dan tekanan yang berbeda. Mungkin ia tidak terlibat langsung dengan peristiwa yang diamati. Tetapi terlibat dalam proses penelitian dan produksi pengetahuan adalah praktik terlibat dalam hubungan sosial. Pengamat yang paling diam pun -- misalnya agen intel -- adalah praktisi.

Tidak ada pengamat yang tidak praktisi. Atau sebaliknya praktisi yang bukan pengamat. Pembedaan praktisi *versus* pengamat -- seperti konsep "politik praktis" -- adalah fiksasi yang diperlakukan oleh kalangan otoritas bicara dan kuasa.

Ironisnya, pertentangan politik sering kali terjadi di antara mereka yang ternyata sama-sama memeluk ideologi yang sama. Misalnya ideologi yang meyakini adanya kebenaran sejati, yang tertutup, esensial, atau metafisikal.

Ilmu sosial pernah/masih berkuasa sewenang-wenang terhadap obyek pengetahuan. Ilmu pengetahuan layak diwaspadai dan dicurigai. Namun kita hanya bisa mewaspadai dan mengendalikannya bila kita mengetahuinya cukup baik.

Dengan demikian, kita bisa menghindari kesalahan yang pernah dilakukannya. Sikap bermusuhan terhadap ilmu sosial yang ditunjukkan di atas masih mencoba mengulangi kesalahan-kesalahannya. Dan si penutur bisa berbahasa lancar tanpa harus lampau.**

*Ariel Heryanto, staf pengajar Program Pascasarjana UK Satya Wacana, Salatiga.